BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting membangun masa depan negara. Pendidikan merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh warga negara. Pendidikan memberikan akses untuk setiap individu agar bisa membantunya membangun karakter, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Banyak masyarakat berpikir bahwa pendidikan hanya untuk sekedar belajar materi akademik, tapi nyatanya melalui pendidikan masyarakat bisa belajar banyak seperti membangun karakter dan hal-hal lainnya di luar akademik.

Pendidikan merupakan investasi di masa depan. Melalui pendidikan, kita dapat menata masa depan dengan bijaksana dan dapat berpikir lebih kritis dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan. Pendidikan merupakan hak bagi setiap masyarakat. Sebenarnya pendidikan itu dapat kita tempuh dimanapun dan kapanpun sehingga kita sebagai manusia sepatutnya bisa menyadari hal tersebut.

Pendidikan merupakan jembatan untuk membangun wilayah yang lebih baik lagi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk menciptakan suasana belajar, membentuk potensi individu yang meliputi aspek spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan untuk berkontribusi di masyarakat.

Urgensi pemerataan akses pendidikan juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, yang menitikberatkan pada peningkatan keterjangkauan pendidikan di seluruh jenjang, termasuk pelaksanaan program wajib belajar selama 12 tahun, serta penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui upaya pendataan yang komprehensif dan pendampingan yang terstruktur.

Di samping itu, dasar hukum lain yang menjadi pijakan dalam penuntasan masalah ini antara lain tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk memperoleh pendidikan yang layak sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar anak. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, yang menitikberatkan pada pentingnya penyediaan akses pendidikan yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga mendukung pembangungan karakter peserta didik secara holistik. Kedua regulasi ini secara sinergis memperkuat landasan normatif bagi pemerintah dalam menyelenggarakan program pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pengembangan potensi anak secara menyeluruh. Selain itu, terdapat instruksi presiden terbaru nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasasn kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam instruksi presiden Prabowo, khususnya untuk kementerian pendidikan dasar dan menengah, instruksi ini berisi beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan serta menyiapkan program/bantuan pendidikan dasar dan mengah secara tepat sasaran;
2. Menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan pendidikan lainnya secara tepat sasaran;
3. Menyiapkan dan menyusun kurikulum sekolah rakyat berasrama yang berlandaskan pada sekolah formal; dan
4. Menyediakan guru, tenaga pendidik dan siswa untuk program sekolah rakyat.

seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. PP ini mengatur tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menjamin akses pendidikan yang memadai melalui jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi. Pendidikan juga menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara, yang berperan penting dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor.

Berbicara tentang pendidikan, terdapat masalah yang disebut ATS (Anak Tidak Sekolah) atau anak putus sekolah. Dimana anak-anak harus menempuh pendidikan agar bisa menunjang masa depannya tetapi kebanyakan yang terjadi terlebih di daerah pedesaan anak-anak harus berhenti untuk bersekolah atau bahkan tidak bersekolah sama sekali dikarenakan beberapa faktor seperti ekonomi hingga psikologinya.

Pendidikan di daerah Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah juga mengalami permasalahan ATS dan anak putus sekolah yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mamuju Tengah adalah wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurma DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). data terakhir menggambarkan jumlah penduduk Kabupaten Mamuju Tengah kurang lebih 143 ribu jiwa (Darmawan, 2025).

Tabel 1

Persentase Penduduk berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan

Kabupaten dan Provinsi	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas menurut status pendidikan (persen)								
	Tidak/belum pernah sekolah			Masih sekolah			Tidak bersekolah lagi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Kabupaten Majene	5,74	5,21	5,81	28,08	28,78	26,50	66,18	66,01	67,69
Kabupaten Polewali Mandar	10,16	9,23	8,39	25,46	24,94	25,76	64,38	65,83	65,85
Kabupaten Mamasa	10,29	11,02	9,40	26,73	25,81	28,11	62,97	63,17	62,49
Kabupaten Mamuju	8,00	8,59	7,23	28,01	26,56	25,17	63,99	64,85	67,61
Kabupaten Pasangkayu	5,92	7,78	7,38	26,81	24,62	20,31	67,27	67,60	72,32
Kabupaten Mamuju Tengah	**6,45**	**7,32**	**5,66**	**28,89**	**24,63**	**22,79**	**64,66**	**68,05**	**71,55**
Provinsi Sulawesi Barat	8,25	8,43	7,52	26,99	25,79	24,95	64,75	65,78	67,52

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di-*update* pada 30 Desember 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024)

Berdasarkan data tabel 1, di daerah Kabupaten Mamuju Tengah jumlah anak tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2022 menuju tahun 2023 mengalami kenaikan dari 6,45% ke 7,32%. Namun, pada tahun 2023 menuju tahun 2024 mengalami penurunan dari 7,32% menjadi 5,66%. sedangkan jumlah anak tidak bersekolah lagi atau biasa disebut anak putus sekolah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2022-2023

kenaikannya sekitar 3,39%. Lalu pada tahun 2023-2024 juga mengalami kenaikan jumlah anak putus sekolah yaitu sekitar 3,5%.

Pada tahun 2020, terdapat sekitar 32 ribu anak berusia 7-18 tahun yang termasuk dalam kategori ATS di Sulawesi Barat (Safitri, 2020). Bahkan, jumlah tersebut belum termasuk anak-anak yang sulit terdata akibat sulitnya akses informasi di desa-desa terpencil. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 49 ribu anak tidak bersekolah di wilayah ini. Meskipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat berhasil menurunkan angka ATS sebanyak 9.964 anak pada periode Mei-Agustus 2023, jumlah ATS tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintah setempat (Amirullah, 2023).

Salah satu program yang dijalankan untuk penuntasan ATS dan anak putus sekolah yaitu Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh TVRI Sulbar bersama Ketua Tim Program Portal Anak Tidak Sekolah (ATS), Bapak Yoanis Peterson, terungkap bahwa program ini bertujuan untuk menurunkan angka ATS di wilayah tersebut, terutama untuk anak-anak berusia 7-18 tahun (TVRI Sulbar, 2020). Program ini diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Barat, yang saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai daerah otonom baru yang dibentuk pada akhir tahun 2012, juga mengalami berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah ini telah mengalami peningkatan, masalah ATS tetap

menjadi perhatian serius. Upaya peningkatan pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, namun angka putus sekolah masih signifikan (Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, 2021). Masalah penanganan ATS/Anak Putus Sekolah tercantum dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah No.4 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan pendampingan kepada ATS bagi masyarakat yang tidak mampu.

Terdapat lima kecamatan di daerah Mamuju Tengah diantaranya yaitu kecamatan Budong-budong, kecamatan Karossa, kecamatan Topoyo, kecamatan Tobadak dan kecamatan panagale. Data terbaru yang didapatkan dari dinas pendidikan kabupaten Mamuju Tengah, berdasarkan kecamatan, kecamatan yang memiliki jumlah anak putus sekolah tertinggi adalah di daerah kecamatan Budong-budong. Di kecamatan Budong-budong 671 anak mengalami putus sekolah. Sedangkan kecamatan yang memiliki anak putus sekolah terendah yaitu kecamatan Pangale dengan jumlah sebanyak 265 anak.

Masalah anak putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:

1. Kemiskinan: Banyak keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga anak-anak lebih memilih untuk membantu orang tua bekerja.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa), (2020-2024)

No.	tahun	Jumlah kemiskinan (persentase)
1	2020	6,79
2	2021	7,13
3	2022	7,17
4	2023	7,32
5	2024	7,72

Sumber: databoks

Berdasarkan data di tabel 2, dapat dilihat persentase jumlah penduduk miskin di daerah Mamuju Tengah tingkat kemiskinan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk pada tahun 2024 lalu di kabupaten ini berjumlah sekitar 143.270 jiwa. Jadi jika dihitung jumlah penduduk kemiskinan sekitar 10.029 jiwa. Mayoritas mata pencaharian di daerah tersebut adalah nelayan dan petani. Banyaknya keluarga yang tidak mampu sehingga menyebabkan anak-anak yang seharusnya menempuh pendidikan yang layak lebih memilih untuk membantu orangtuanya untuk mencari nafkah agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Aksesibilitas dan infrastruktur: Banyak desa yang letaknya jauh dari fasilitas pendidikan, dan infrastruktur yang kurang memadai menghambat akses ke sekolah. Akses untuk ke sekolah tidak nyaman untuk dilalui oleh anak-anak sekolah guru, warga hingga pengendara lainnya. Hal itu dikarenakan kondisi jalannya tidak rata dan sering terendam air saat hujan deras. Berikut adalah gambaran keadaan infrastruktur sekolahnya di salah satu wilayah kabupaten

Mamuju Tengah kecamatan Tobadak (Bachri, 2022; Menara Indonesia, 2022):

Gambar 1

Kondisi Jalan Menuju SMAN 1 Tobadak, Mamuju Tengah (2022)



Sumber: Sulbar Tribun News

Gambar 2

Kondisi Kelas di SD Inpres Saloada Rusak Belum Pernah Dapat Bantuan Pemerintah (2022)



Sumber: Menaraindonesia.com

3. Kebijakan pendidikan: Kebijakan yang kurang spesifik atau bahkan ada yang belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi hambatan dalam

peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil. Sejatinya di setiap daerah mempunyai kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikannya dari segala aspek. Namun, hal ini terhalang oleh pengimplementasiannya di lapangan yang kurang efektif dan kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat. Hal tersebut juga harus didukung oleh para pemangku kebijakan untuk optimalisasi kebijakan pendidikan yang ada. Berikut adalah potret seorang anak di desa terpencil di daerah Mamuju tengah yang menuju ke sekolahnya dan dia harus menempuh perjalanan ssejauh belasan kilometer.

Gambar 3

Anak-Anak Pedalaman Terpencil Di Mamuju Tengah,Sulbar Berjalan Kaki Menuju Sekolah



Sumber:Kompas

Salah satu anak yang bernama Valen yang tinggal di desa Salolekbo itu sudah harus meningalkan rumahnya ketika matahari baru terbit demi sampai di sekolah tepat waktu. Dengan seragam sekolahnya, ia rela berjalan kaki menggunakan sendal jepit bahkan ia juga pernah pergi tanpa alas kaki jika sandalnya sudah

rusak/putus. Terlebih lagi ketika musim hujan datang, banyak orangtua yang mencemaskan keselamatan anak-anaknya dan memilih untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Karena banyaknya desa terpencil, sehingga kebijakan pemerintah tidak merata dan belum bisa terealisasi secara sempurna. Yang pada akhirnya berdampak pada anak, orangtua hingga tenaga pengajar yang ada.

4. Psikologis: beberapa anak berhenti atau tidak sekolah juga dikarenakan hal psikologis. Faktor psikologis ini menyangkut tentang kurangnya motivasi anak untuk menempuh pendidikan, tidak menganggap dirinya berharga hingga mengalami gangguan mental. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari bapak Nur Akbar Mubarak selaku staff sarana dan prasarana di dinas pendidikan Mamuju Tengah, beliau menyatakan bahwa:

> *"anak-anak saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi ataupun infrastruktur. Terkadang dan sangat sering dilupakan yaitu faktor psikologis. Anak-anak sekarang membutuhkan dorongan dari orangtuanya langsung untuk menempuh pendidikan. kebanyakan mereka lebih termotivasi untuk mendapatkan uang lebih cepat daripada bersusah-susah untuk belajar di sekolah. Kami pun selaku pihak pemerintah sudah mengupayakan yang terbaik untuk menuntaskan anak-anak yang putus maupun tidak bersekolah".*

Mengingat pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM, kebijakan pendidikan yang diterapkan di Mamuju Tengah perlu dievaluasi lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta nota kesepahaman antara Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait penanganan ATS menunjukkan betapa pentingnya kualitas pendidikan bagi pembangunan SDM, khususnya di wilayah terpencil.

Masalah tersebut pasti bercermin terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai landasan awal untuk melakukan penelitian ini. Pertama dari disertasi yang ditulis oleh Busdir, yang juga sempat menjabat menjadi kepala dinas pendidikan Mamuju Tengah dengan judul yaitu *Principal-Agent* Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar (Studi Kasus: Program Anak Tidak Sekolah) Di Kabupaten Mamuju Tengah. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari disertasi tersebut menyatakan bahwa *Principal* sebagai regulator telah cakap berperilaku sesuai dengan aspek mekanisme intitusi regulasi yaitu aturan hukum & sanksi (Busdir, 2022). Hal ini terlihat pada hasil penelitian sudah adanya regulasi mengenai kebijakan Pendidikan dasar khususnya Pendidikan dasar Kawasan terpencil. agent sebagai eksekutor telah cakap berperilaku sesuai dengan aspek mekanisme institusi normatif yaitu bertanggung jawab melalui sertifikasi & akreditasi. hubungan principal dan agent sebagai regulator dan eksekutor sudah baik sesuai dengan aspek mekanisme institusi cultural kognitif yaitu pemahaman Bersama dan aksi logis Bersama. Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini akan berfokus pada peran pemerintah, tenaga pengajar, dan masyarakat untuk mengatasi anak putus sekolah khususnya di daerah Mamuju Tengah.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Morin Benjamin, Agustinus Pati dan Frans Singkoh dengan judul Strategi Dinas Pendidikan dalam Meminimalisir Anak Putus Sekolah di Kota Bitung menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah strategi sudah cukup baik dalam menekan angka anak putus sekolah, antara lain: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menekan angka Anak Putus Sekolah yakni berupa gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat sesuai visi dan misi pembangunan Kota Bitung, Pemberian bantuan dana, Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, Program BSM (Bantuan Siswa Miskin), Program PIP (Program Indonesia Pintar), Program MaMa CEPAT (Cerdas Peduli Anak Tidak Sekolah), dan Sosialisasi kepada masyarakat (Benjamin, Pati, & Singkoh, 2017).

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Ahmad Fauzi R, Andi Gau Kadir dan Andi Murfhi dengan judul Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa upaya atau peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat. berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah adalah kurangnya minat anak untuk bersekolah, keadaan keluarga yang tidak

harmonis, lemahnya ekonomi keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal anak, pandangan masyarakat akan pendidikan (Fauzi, Kadir, & Murfhi, 2012).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki implementasi kebijakan pendidikan di daerah ini dan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi angka Anak Putus Sekolah di Tingkat SD pada Kabupaten Mamuju Tengah di kecamatan Budong-budong?.

C. Tujuan

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatasi tingkat putus sekolah di Tingkat sekolah dasar pada Kabupaten Mamuju Tengah di Kecamatan Budong-budong.

D. Manfaat

Dilihat dari manfaatnya, maka penelitian ini memiliki manfaat dari dua sisi yaitu :

1. Manfaat akademik dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu terkait kebijakan publik yang sehubungan dengan peran pemerintah dalam mengatasi Tingkat Putus Sekolah di Tingkat SD pada kabupaten Mamuju Tengah serta sebagai penerapan teori dan konsep dari ilmu administrasi publik terutama di kebijakan publik.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi penting, khususnya bagi pembuat kebijakan publik terkait penanganan masalah anak putus sekolah. Selain itu, juga sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.